# ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan yang melatarbelakangi penolakan Cina terhadap pembuangan *ALPS-treated water* Fukushima Daiichi pada periode 2021–2024 serta menjelaskan tindakan lanjutan yang diambil pemerintah Cina sebagai respons terhadap kebijakan Jepang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan yang memanfaatkan dokumen resmi pemerintah, laporan organisasi internasional, jurnal ilmiah, buku, dan artikel berita sebagai sumber data. Analisis dilakukan menggunakan teori sekuritisasi Thierry Balzacq yang menekankan peran aktor sekuritisasi, penggunaan metafora, penerimaan audiens, kesesuaian klaim ancaman dengan kondisi yang berkembang, serta tindakan lanjutan melalui respon kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan Cina tidak hanya didasarkan pada aspek ilmiah mengenai keamanan pembuangan *ALPS-treated water*, tetapi juga dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat, keamanan lingkungan lintas batas, hukum internasional, kondisi sosial, serta dinamika geopolitik Cina–Jepang. Pemerintah Cina berhasil mengonstruksikan isu tersebut sebagai ancaman melalui berbagai pernyataan resmi yang memperoleh penerimaan masyarakat dan memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk mengambil berbagai respons kebijakan, termasuk penangguhan total impor produk laut dari Jepang dan pengetatan pengawasan terhadap produk perairan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penolakan Cina merupakan hasil dari proses sekuritisasi yang berhasil mengubah isu lingkungan menjadi isu keamanan, sehingga memengaruhi respons kebijakan pemerintah Cina terhadap keputusan Jepang.



**Kata kunci: Cina, *ALPS-treated water*, Fukushima Daiichi, Jepang, sekuritisasi, keamanan lingkungan.**

## *ABSTRACT*

*This study aims to analyze the factors underlying China's opposition to the discharge of Fukushima Daiichi ALPS-treated water during the 2021–2024 period and to explain the follow-up measures adopted by the Chinese government in response to Japan's decision. This research employs a qualitative method with a descriptive approach based on library research, utilizing official government documents, reports from international organizations, academic journal articles, books, and news reports as data sources. The analysis applies Thierry Balzacq's securitization theory, emphasizing the role of the securitizing actor, the use of metaphors, audience acceptance, the correspondence between threat claims and actual conditions, and the adoption of policy responses. The findings reveal that China's opposition was driven not only by scientific concerns regarding the safety of the ALPS-treated water discharge but also by concerns over public health, transboundary environmental security, international law, social conditions, and the geopolitical dynamics between China and Japan. The Chinese government successfully framed the discharge as a security threat through official statements that gained public acceptance and provided legitimacy for the government to adopt a range of policy responses, including a comprehensive ban on Japanese seafood imports and stricter monitoring of aquatic products. This study concludes that China's opposition represents the outcome of a successful securitization process that transformed an environmental issue into a security issue, thereby shaping the Chinese government's policy responses toward Japan's decision.*



***Keywords: China, ALPS-treated water, Fukushima Daiichi, Japan, securitization, environmental security.***